

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendali intern pemerintah

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

BUKU

Burhan Asshafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Dr. Aditya Sulistyawan. "DIKTAT MATA KULIAH, METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM." Semarang, 2022.

Dr.H. Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D; *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia*. Edited by Lukman Santoso. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.

Dwi Putri, Cahyawati. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:

Gramata Publishing, 2011.

Hamzah, Prof. Dr. M. Guntur. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. Pusat Pendidikan Mahkamah Republi Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2018.

Hanitijo, Rommy. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Edited by Ema Dewi. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.

Irvan, Mawardi. *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Nur Basuki Minarno. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009.

Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2009.

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Transformasi Dan Refleksi)*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Triwulan, Titik. *POKOK POKOK HUKUM TATA NEGARA*. Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Triwulan, Titik, and Ismu Widodo Gunadi. *Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Edited by Prenada Media Group. Jakarta, 2011.

Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ictiar Baru, 1990.

Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAIN

Adriani, Adnani. “Perbedaan Unsur-Unsur ‘Menyalahgunakan Kewenangan’ Dalam Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Administrasi Dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Dan Apakah Konsekuensinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019).

Akbar, Muhammad Kamil. “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2021).

Anastasya Millenisa, Tuela. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.” *Lex Privatum* 11, no. 01 (2023): 3.

Anggoro, Firna Novi. “PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016).

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019).

Awaluddin. “Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum.” *Academia : Majalah Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2011).

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*,. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.

Dr. Aju Putrijianti. S.H. M.H. “Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No.30/2014 Tentang Administrasi

- Pemerintahan.” *Masalah Masalah Hukum (MMH)* 44, no. 4 (2015).
- Fauzi Syam, Sukanto Satoto, Helmi. “Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.” *Jurnal Hukum* 6 (2023).
- Juliyanto, Agus. “Ajaran Thomas Hobbes Tentang Negara Sebagai ‘Leviathan.’” *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 1, no. 01 (2019).
- Manao, Disiplin F. “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (2018).
- Monica Candra Apriliana, Georgia. “DOMINUS LITIS DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta).” *Verstek* 10, no. 3 (2023).
- Putri, Amelia, and Bunga Ningsih. “Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 133.
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama. “Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018).
- Putrijanti, Aju, and Lapon Tukan Leonard. “KOMPETENSI PERATUN UNTUK MEMERIKSA UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG.” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019).
- Putrijanti, Aju, Lapon Leonard, and Kartika Widya Utama. “Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017).
- Setya, Cekli, Shinta Ayu, Fauzi, and Yulita Christina. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Edited by Prof. Adrian Bedren. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP, 2015).

Simbolon, Bob Humisar. “Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Dharmasya (Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia)* 2 (2022): 883.

Theriya Karmila, I Gusti Ketut Ariawan, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan.” *Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019).

Tutik, Titik triwulan. “Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2018): 373–98.

Wahyunadi, H. Yodi Martono. “KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.” Artikel Layanan Hukum, n.d.

Widhi Antoro, Bibianus Hengky. “Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Ptun.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020).

LAPORAN PENELITIAN

Dani Elpah, Et Al. *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN Dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*. Jakarta: Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, 2016.

SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

Pramono, Budi. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Universitas Brawijaya, 2017.

Susanto, Aman. “Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN Pasca Disahkannya UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Universitas Islam Indonesia, 2017.